

SIKAP NON-KOOPERATIF DAN MARHAENISME DALAM PARTAI NASIONAL INDONESIA

Fitri Nurjihan¹, Maretta Br. Ginting², Rieke Corry Betsena Br. Tarigan³

¹²³Universitas Negeri Medan

Article Info

Article history:

Published April 30, 2024

Kata Kunci:

PNI, Sikap Non-Kooperatif, Marhaenisme.

Keywords:

PNI, Non-Cooperative Attitude, Marhaenism.

ABSTRAK

Sikap non-kooperatif yang merupakan salah satu prinsip utama PNI yang menegaskan penolakan terhadap bentuk kolonialisme dan penindasan. PNI, di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Mohammad Hatta, menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda yang mengklaim kedaulatan di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi literatur. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan membangun makna tentang fenomena yang merefleksikan pemikiran politik Indonesia saat ini. Ideologi Marhaenisme pada dasarnya sebuah ideologi dan ajaran yang menghendaki penghapusan segala bentuk pertentangan dan perbedaan. Dengan mendirikan beberapa partai atau organisasi yang non-kooperatif terhadap bangsa barat. Salah satunya Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Soekarno dan para tokoh pendiri lainnya. Dengan menunjukkan sikap non-kooperatif terhadap Belanda dan membentuk Partai tersebut. artinya tidak bekerja sama dengan pihak penjajah. Gagasan non-kooperasi pernah diungkapkan oleh Moh. Hatta yaitu mengutamakan persatuan dan tidak melakukan kerjasama dengan pemerintah kolonial.

ABSTRACT

The non-cooperative stance that was one of the PNI's main principles emphasized the rejection of all forms of colonialism and oppression. The PNI, under the leadership of figures such as Soekarno and Mohammad Hatta, refused to cooperate with the Dutch colonial government that claimed sovereignty in Indonesia. The writing of this article uses a descriptive method with a qualitative approach and uses a literature study method. With this method, the researcher seeks to describe, analyze, and construct meaning about phenomena that reflect current Indonesian political thought. Marhaenism ideology is basically an ideology and teaching that requires the elimination of all forms of opposition and differences. By establishing several non-cooperative parties or organizations against the West. One of them is the Indonesian National Party (PNI) founded by Soekarno and other founding figures. By showing a non-cooperative attitude towards the Dutch and forming the Party, it means not cooperating with the colonizers. The idea of non-cooperation was once expressed

by Moh. Hatta, namely prioritizing unity and not cooperating with the colonial government.

1. PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah politik Indonesia, Partai Nasional Indonesia (PNI) memainkan peran yang tak terbantahkan dalam memimpin perjuangan kemerdekaan dan menentang segala bentuk penindasan. Landasan ideologisnya yang kuat, terutama melalui konsep sikap non-kooperatif dan Marhaenisme, membentuk karakter dan arah perjuangan partai tersebut.

Sikap non-kooperatif merupakan salah satu prinsip utama PNI yang menegaskan penolakan terhadap bentuk kolonialisme dan penindasan. PNI, di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Mohammad Hatta, menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda yang mengklaim kedaulatan di Indonesia. Prinsip ini menjadi pendorong utama di balik serangkaian gerakan perlawanan, termasuk Boikot Belanda, yang menandai penolakan terhadap segala bentuk kerjasama yang tidak setara.

Di sisi lain, Marhaenisme, yang dipopulerkan oleh Soekarno, adalah konsep yang menganjurkan kesetaraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka dari kalangan petani dan buruh. Marhaenisme menekankan pentingnya redistribusi tanah dan sumber daya ekonomi untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang melanda masyarakat Indonesia pada masa itu. Konsep ini menjadi pilar dalam pembentukan identitas PNI sebagai partai yang berpihak pada kepentingan rakyat jelata.

Artikel ini akan menguraikan lebih lanjut tentang peran dan dampak sikap non-kooperatif dan Marhaenisme dalam perjuangan politik PNI, mulai dari akar sejarahnya hingga konsekuensi politiknya terhadap perjalanan sejarah politik Indonesia secara keseluruhan. Dengan memahami kedua konsep ini, kita dapat mengapresiasi peran penting PNI dalam mengawal kemerdekaan dan memperjuangkan keadilan sosial di Indonesia.

2. METODOLOGI

Untuk menjelaskan tentang gagasan pemikiran yang lahir dari ideologi Soekarno sejak awal berdirinya Partai Nasional Indonesia yang menjadi salah satu organisasi yang menggerakkan semangat kemerdekaan dengan konsep pemikiran Soekarno yang dikenal dengan Marhaenisme. Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi literatur. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan membangun makna tentang fenomena yang merefleksikan pemikiran politik Indonesia saat ini. Hal ini sejalan dengan pemikiran Whitney (1960:160) yang menyatakan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh–pengaruh dari suatu fenomena. Metode studi literatur merupakan sebuah metode penelitian dengan cara pengumpulan data pustaka serta mengelolah data tersebut. Studi literatur melalui beberapa tahapan diantaranya dengan mengetahui jenis pustaka yang dibutuhkan dan mengkaji dan mengumpulkan bahan pustaka pengkajian. Pada tahapan mengetahui jenis pustaka yang dibutuhkan sesuai dengan sumber tertulis, seperti buku-buku pengetahuan, majalah, dan surat kabar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI)

Kondisi sosio-politik yang kompleks karena menyesuaikan kondisi politik baru pasca tragedi pemberontakan PKI 1926 yang gagal. Maka diperlukan organisasi baru sebagai wadah aspirasi rakyat untuk menyalurkan aspirasi yang tidak mungkin ditampung oleh organisasi-organisasi politik yang ada pada waktu itu. Kondisi politik kolonial Belanda yang reaksioner dan munculnya gagasan nasionalisme modern di Indonesia telah memberi ruang untuk terbentuknya organisasi-organisasi yang bercorak nasionalisme murni dan bersifat radikal (Soejono & Leirissa, 2010). Organisasi yang akan lahir harus melihat kedepan dan berbenah agar tidak terulang kesalahan yang sama. Pengembangan pemikiran seperti inilah yang harus dilakukan oleh organisasi-organisasi setelahnya (Nukman, 2021).

Partai Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan nama PNI, merupakan partai yang terinspirasi dari masyarakat Marhaen yang digagas oleh Soekarno. PNI adalah partai pelopor dalam aksi massa yang mempunyai tujuan sama dengan kaum Marhaen (Situmorang, 2016). Berawal dari organisasi dari *Algemeene Studieclub* yang didirikan Ir. Soekarno pada tahun 1925 di Bandung untuk kalangan mahasiswa terutama mahasiswa *Teknische Hogeschol* (Sekolah Tinggi Teknik). Perserikatan ini didirikan oleh Ir. Soekarno, Mr. Sartono, Dr. Samsi, Ir. Anwari, J. Tilaar, Mr. Iskaq Tjokroadisuryo, Sudjadi, Mr. Budiarto, dan Mr. Sunario pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung (Suhartono, 1994). Di antara para tokoh pendiri PNI ini, ada lima orang yang merupakan mantan dari anggota *Perhimpunan Indonesia* (PI), yang pernah belajar di Belanda. PNI dan PI sebenarnya tidak memiliki hubungan organisasi. namun PNI mempunyai hubungan erat dengan PI di negara Belanda. Kegelapan di negara jajahan ini disoroti oleh organisasi yang mulai mengambil propaganda secara intensif mulai secara lisan maupun tulisan. Tujuannya pokoknya adalah Indonesia merdeka dengan cara membangkitkan semangat kebangsaan menjadi semangat kekuatan nasional dengan memperdalam kesadaran rakyat untuk mengerahkan pergerakan nasional.

Berdirinya PNI ini, dilatarbelakangi oleh pemikiran Bung Karno yang mengemukakan untuk mendirikan partai radikal, yang menuntut Indonesia merdeka pada tahun (1926\1927), Dahulu banyak teman-temannya yang menentang pemikiran dari Bung Karno, namun Bung Karno tetap berpegang teguh pada pendapatnya, akhirnya semua temannya menyetujui dan bersatu membentuk Partai Nasional Indonesia yang tujuannya menuntut kemerdekaan Indonesia dan memiliki jumlah anggota yang banyak, dihitung sampai akhir Desember 1929 ada kurang lebih 10.000 anggota (Soejono & Leirissa, 2010). Yang dapat menjadi anggota PNI adalah orang Indonesia yang sekurangkurangnya telah berumur 18 tahun. Orang-orang Asia lainnya dapat juga menjadi anggota PNI tetapi hanya sebagai anggota luar saja (Tirtoprojo, 1980). Tujuan PNI adalah mencapai Indonesia merdeka terlepas dari segala penjajahan. Jika Indonesia terlepas dari penjajahan maka susunan kehidupan, struktur politik dan sosial ekonomi akan kembali. Tujuan ini hendak dicapai dengan asas “percaya pada diri sendiri” dan tidak bekerjasama dengan pemerintah Kolonial Belanda. Memperbaiki keadaan politik, sosial, dan ekonomi dengan kekuatan bangsa sendiri. Yakni dengan mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik-poliklinik, bank

nasional, dan lain lain. Sebab itulah PNI bersikap non-koperasi atau tidak ikut dalam dewan-dewan yang diadakan pemerintah.

PNI yakin jika Indonesia terlepas dari penjajahan maka susunan kehidupan dan struktur sosial masyarakat Indonesia akan kembali seperti sebagaimana semestinya. Tujuan tersebut bisa tercapai jika bisa berdiri sendiri atau percaya pada diri sendiri dan tidak bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda. PNI yakin dengan gerakan-gerakan revolusioner, pemerintah kolonial Belanda tidak akan memberikan jalan untuk tercapainya kemerdekaan Indonesia, jadi Rakyat Indonesia harus mencari dan menemukan jalan itu sendiri dengan percaya kepada diri sendiri (Soejono & Leirissa, 2010). Dengan membuat program-program pengorganisasian sebanyak-banyaknya pada kongres pertama tanggal 27-30 Mei 1928 di Surabaya. Diasuh oleh semangat membangun persatuan masyarakat, PNI dengan cepat mendapat dukungan dari berbagai pihak. (Soejono & Leirissa, 2010). Peranan Soekarno dalam meningkatkan kehidupan PNI dengan membakar semangat fanatisme rakyat melalui pidato-pidatonya di berbagai kesempatan walaupun demikian panjangnya inilah yang menjadi salah satu faktor pesatnya pertumbuhan PNI.

Konsep Pendekatan Yang Diadopsi PNI dalam Perjuangannya Melawan Belanda

Partai Nasional Indonesia (PNI) mengadopsi beberapa pendekatan dalam perjuangannya melawan penjajahan Belanda di Indonesia. Hal-hal yang menjadi salah satu strategi dalam perjuangannya ini termasuk sikap non-kooperatif, gerakan politik, diplomasi internasional, perlawanan bersenjata, dan mobilisasi massa yang merupakan suatu konsep yang diterapkan dalam organisasi tersebut dalam melakukan pendekatan.

1. Sikap Non-Kooperatif

PNI menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda dan menentang segala bentuk kerjasama yang dianggap tidak setara. Ini tercermin dalam kebijakan boikot terhadap produk-produk Belanda dan penolakan terhadap partisipasi dalam lembaga-lembaga kolonial. Sikap ini memperkuat identitas nasionalisme Indonesia dan menggalang dukungan rakyat untuk perjuangan kemerdekaan.

2. Gerakan Politik

PNI menggunakan jalur politik untuk menyuarakan aspirasi kemerdekaan. Mereka mendirikan organisasi-organisasi politik seperti Jong Java dan Perserikatan Perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak politik dan kebebasan berpendapat. Melalui kampanye politik, PNI berhasil memperluas basis dukungan dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan rakyat.

3. Diplomasi Internasional

PNI aktif dalam upaya diplomasi internasional untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Misalnya, delegasi PNI yang dipimpin oleh Soekarno dan Mohammad Hatta berpartisipasi dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955, yang menghasilkan Deklarasi Bandung dan menempatkan Indonesia sebagai pemimpin gerakan kemerdekaan dunia ketiga.

4. Perlawanan Bersenjata

Meskipun lebih dikenal karena pendekatannya yang non-kooperatif dan politik, PNI juga terlibat dalam perlawanan bersenjata terhadap penjajah. Salah satu contoh terkenal adalah Peristiwa Malari pada tahun 1946 di Jakarta, di mana PNI melakukan pemberontakan bersenjata terhadap tentara Belanda. Meskipun akhirnya berhasil ditumpas, perlawanan bersenjata ini menunjukkan ketegasan PNI dalam memperjuangkan kemerdekaan.

5. Mobilisasi Massa

PNI menggunakan mobilisasi massa sebagai alat untuk memperkuat perjuangan melawan Belanda. Mereka mengorganisir berbagai demonstrasi, mogok kerja, dan aksi

protes untuk menunjukkan kekuatan dan solidaritas rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Mobilisasi massa juga digunakan untuk mendukung kampanye politik PNI dan menekan pemerintah kolonial.

Secara keseluruhan, PNI mengadopsi pendekatan yang beragam dalam perjuangannya melawan Belanda, mulai dari pendekatan politik hingga perlawanan bersenjata. Pendekatan ini mencerminkan komitmen PNI untuk meraih kemerdekaan Indonesia dan mengakhiri penjajahan kolonial.

Perjuangan PNI Yang Bersikap Non-Kooperatif dan Visinya Dalam Marhaenisme

Pemikiran Soekarno yang idealisme revolusioner dan anti penindasan, ia menjelma menjadi sosok pemikir yang represif dan anti demokrasi. Dengan dalih revolusi belum selesai ia mengkonsepkan demokrasi sesuai penafsirannya, bahwa demokrasi yang dikembangkan oleh dunia Barat (parlemen) tidak sesuai dengan nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia yang terkenal dengan sifat gotong royong dan musyawarah. sikap anti kolonialisme dan imperialisme tampak jelas ditunjukkan oleh Soekarno. Ia menjelaskan bahwa motivasi utama para kolonialisme Eropa datang ke negara-negara Asia Afrika adalah motif ekonomi untuk menumpuk serta mengakumulasi kapital dengan memeras tenaga dan kekayaan alam di negeri-negeri yang mereka kuasai. (Pratama, Asyiah2, & Chandra, 2022).

Dengan adanya penguasaan atas kekayaan alam oleh Negara Eropa khususnya Belanda, Soekarno menyerukan perlawanan untuk mengakhiri penindasan dan penghisapan atas kaum pribumi. Perlawanan yang harus ditempuh menurutnya haruslah dengan jalan non kooperasi dan persatuan dikalangan kaum pergerakan yang tersebar pada tiga aliran kekuatan politik yang besar : Nasionalisme, Islam dan Marxisme. Soekarno menganjurkan adanya kerjasama diantara ketiganya demi terciptanya kemerdekaan bangsa Indonesia. (Baskara T Wardaya, 2006 : 37-50) . Ide persatuannya ini sebenarnya bukanlah ide orisinal dari seorang Soekarno, jauh sebelumnya tahun 1923 tokoh Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda, Mohammad Hatta sudah mengumandangkan pentingnya persatuan dan satu front bersama. (MajalahTempo, 2010: 5).

Selain dilatarbelakangi oleh semangat nasionalisme dan persatuan, keinginan Soekarno mempersatukan Nasionalisme, Islam dan Marxisme sebagai tiga kekuatan politik melawan imperialisme, sebenarnya dipengaruhi oleh konsep kekuasaan Jawa Tradisional. Dalam konsep kekuasaan Jawa Tradisional dikenal konsep kerukunan, sebuah konsep yang mengandung makna untuk berusaha terus menerus bersikap tenang antara satu sama lain, menghilangkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat dan berusaha menyingkirkan unsur-unsur yang menimbulkan perselisihan dan keresahan. (Franz Magnis Suseno, 1984). Konsep filosofis etika Jawa ini memprioritaskan persamaan diatas perbedaan, bagi Soekarno persatuan menjadi keniscayaan sejarah untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Karena menurutnya, ketiga ideologi tersebut sama-sama anti eksploitasi serta memiliki akar sejarah yang sama.

Pada tanggal 4 Juli 1927, dengan dukungan dari enam orang kawan dari Algemeene Studieclub, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI), tujuan PNI adalah mencapai kemerdekaan secara sepenuhnya dengan non koperasi, masyarakat sangat antusias menyambut pendirian PNI, terbukti dari rapat-rapat umum yang digelar oleh PNI selalu disesaki oleh ribuan orang. Selain itu, pemikiran Soekarno dalam visinya Marhaenisme, sebuah ideologi yang lahir dari pemikiran Bung Karno yang juga akhirnya mendirikan Partai Nasional Indonesia tersebut. Pemikiran Soekarno tersebut kelak menjadi konsep Nasakom dalam Demokrasi Terpimpin. Pidato-pidatonya berhasil membakar semangat rakyat pada waktu itu. Kelahiran PNI merupakan momen yang baik karena diperkuat oleh semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Meski secara tujuan konsep marhaenisme dan komunisme sama, tetapi dalam praktiknya sangat berbeda. Komunisme di Barat menggunakan kaum buruh sebagai kekuatan utama pergerakan untuk melawan kapitalisme dan imperialisme. Sehingga setiap orang harus menganut proletarianisme agar bisa memahami perjuangan kelas yang dilakukan oleh kaum proletar. Sedangkan marhaenisme tidak terpaku pada kaum buruh saja, karena masyarakat Indonesia itu berbeda kondisinya. Tidak bisa menggunakan komunisme yang dipakai di Barat, karena di Barat sana kapitalismenya berupa industrialisasi di berbagai sektor yang menghasilkan kelas proletar, sedangkan di Indonesia kapitalismenya berupa kapitalisme pertanian yang menghasilkan petani-petani yang melarat. Meski begitu, Bung Karno juga tidak menafikan peran buruh sebagai pelopor pergerakan, sehingga marhaen tidak hanya kaum proletar saja, tetapi juga seluruh rakyat yang sengsara, yang ditindas oleh ketidakadilan imperialisme dan kapitalisme yang eksploitatif (Sukarno, 2019).

Dengan menunjukkan sikap non-kooperatif terhadap Belanda dan membentuk Partai tersebut. artinya tidak bekerja sama dengan pihak penjajah. Jika rakyat atau massa bekerja sama dengan penjajah, maka akan sulit untuk meraih cita-cita kemerdekaan Indonesia (Argenti & Dias, 2018). Non-kooperasi merupakan sikap anti kompromi dengan pihak Belanda. Gagasan non-kooperasi ini juga sebenarnya dari tahun 1923 pernah diungkapkan oleh Moh. Hatta yaitu mengutamakan persatuan dan tidak melakukan kerjasama dengan pemerintah kolonial. Meski begitu, ada perbedaan nonkooperasi Sukarno dengan apa yang dikehendaki Hatta. Kasenda (2014) mengungkapkan bahwa menurut Bung Karno, untuk menumbangkan kekuasaan kolonial, maka akan ada pertentangan kebutuhan antara pihak penjajah dan rakyat yang terjajah, dan pertentangan itulah yang kemudian memberi keyakinan kepada rakyat Indonesia bahwa kemerdekaan tidak akan tercapai jika rakyat Indonesia tidak menjalankan politik non-kooperasi.

Soekarno mengemukakan Marhaenisme tidak akan keluar dari benang merah yang telah ditakdirkan pada tahun 1927 (Raenady & Dewantara, 2021), diantaranya:

1. Marhaen adalah suatu kaum miskin dan melarat, yang terdiri dari petani, buruh, tukang, dan kaum kecil lainnya. Menurut Soekarno, kaum Marhaen merupakan kaum atau rakyat Indonesia yang menderita karena kemiskinan. Kemiskinan ini disebabkan oleh kolonialisme maupun imperialisme bangsa asing.
2. Domisili atau keberadaan kaum Marhaen ada dimana saja baik di gunung, dataran rendah, dataran tinggi, maupun lainnya. Kaum Marhaen memiliki sebuah agama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Keberadaan kaum Marhaen ini berdasarkan ideologi dan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.
3. Sesuai hakikat dan kodratnya, kaum Marhaen berusaha melepaskan belenggu dari lingkaran kemiskinan dan mengharapkan adanya perubahan nasib dan kondisi kehidupan.
4. Ideologi Marhaenisme pada dasarnya sebuah ideologi dan ajaran yang menghendaki penghapusan segala bentuk pertentangan dan perbedaan yang menyebabkan kesengsaraan dan ketidakadilan terhadap rakyat Indonesia. Tujuan ideologi ini adalah membuat masyarakat sejahtera dan adil berdasarkan Pancasila.
5. Cita-cita dari Marhaenisme adalah terhapusnya kemiskinan. Kemiskinan membuat kaum Marhaen menjadi sengsara dan mengalami penderitaan. Dengan dihapusnya kemiskinan ini, bisa mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang sejahtera dan adil tanpa kelas sosial. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka diperlukan sebuah kemerdekaan nasional yang merupakan jembatan emas. Jembatan emas terdiri dari dua jalan. Pertama, jalan kebaikan yang mengarah kepada rasa keadilan dan kemakmuran. Kedua, jalan keburukan yang mengarah kepada celaka dan binasa terhadap masyarakatnya.

Soekarno tidak mengharapkan demokrasi yang hanya fokus pada bidang politik saja, menurut beliau jika hanya terdapat demokrasi politik saja, hal tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan kaum Marhaen. Pemikiran dan Perjuangan Soekarno tentang Demokrasi Tahun 1933-1967 hanya berpihak kepada kaum borjuis ataupun kaum pemilik modal.

4. KESIMPULAN

Masa pergerakan nasional yang menjadi awal dari bangkitnya semangat untuk merdeka dengan menunjukkan sikap anti kolonialisme. Membuat pemuda-pemuda bangsa Indonesia tergerak untuk melawan. Dengan mendirikan beberapa partai atau organisasi yang non-kooperatif terhadap bangsa barat. Salah satunya Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Soekarno dan para tokoh pendiri lainnya. Terbentuknya organisasi ini diawali dengan terinspirasi dari masyarakat Mahaen dan memiliki tujuan yang sama. Pemikiran Soekarno yang idealisme revolusioner dan anti penindasan, ia menjelma menjadi sosok pemikir yang represif dan anti demokrasi. Dengan menunjukkan sikap non-kooperatif terhadap Belanda dan membentuk Partai tersebut. artinya tidak bekerja sama dengan pihak penjajah. Jika rakyat atau massa bekerja sama dengan penjajah, maka akan sulit untuk meraih cita-cita kemerdekaan Indonesia (Argenti & Dias, 2018). Non-kooperasi merupakan sikap anti kompromi dengan pihak Belanda. Gagasan non-kooperasi ini juga sebenarnya dari tahun 1923 pernah diungkapkan oleh Moh. Hatta yaitu mengutamakan persatuan dan tidak melakukan kerjasama dengan pemerintah kolonial.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., Sylviana, M., & Silas, J. (2023). INSTITUSIONALISASI DAN KETAHANAN PARTAI DALAM DEMOKRASI ELEKTORAL INDONESIA: Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 4(1), 106-130.
- Argenti, G., & Dias, D. S. I. (2018). Soekarno's Political Thinking About Guided Democracy. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(2). 46-63.
- Argenti, G., & Istiningdias, D. S. (2017). Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin. *JURNAL POLITIKOM INDONESIA*, 2(2), 14-27.
- Dedi, A. (n.d.). PEMIKIRAN POLITIK SOEKARNO, BUNG HATTA, DAN TAN MALAKA DALAM KEHIDUPAN POLITIK DI INDONESIA. 527-532.
- Dewi, V. O., Nurhaliza, A., & Tarina, D. D. (n.d.). Soekarno Sang Pejuang Kemerdekaan Yang Tak Akan Terlupakan.
- Irshanto, A. B. (2019). Kesadaran Berbangsa Dan Elite Baru Dalam Historiografi Buku Teks SMA Kelas XI Kurikulum 2006. *Jurnal Agastya*, 9(1), 1-14.
- Kasenda, P. (2014). Sukarno Muda Biografi Pemikiran 1926-1933. Depok: Komunitas Bambu.
- Nukman. (2021, Juli-Desember). PERAN PNI DALAM MEMBENTUK KONSEP NASIONALISME 1927-1936. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 3, 139-151
- Pratama, F. F., Asyiah2, A. K., & Chandra, D. (2022). STUDI ANALISIS KONSEP IDEOLOGI MARHAENISME SUKARNO SEBAGAI ASAS PERJUANGAN BANGSA INDONESIA. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(1), 49-63.
- Raeinady, V., & Dewantara, J. A. (2021). PEMIKIRAN SOEKARNO DALAM AJARAN MARHAENISME. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 457-465.
- Seri Buku Tempo, Sjahrir Peran Besar Bung Kecil. (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia KPG, 2010).
- Seri Buku Tempo, Sukarno Paradoks Revolusi Indonesia. (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia KPG, 2010).
- Situmorang, J. T. (2016). BUNG KARNO: Biografi Putra Sang Fajar. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Soejono, R.P & Leirissa, R.Z. (2010). Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kebangkitan Nasional

- dan Masa Hindia Belanda (Vol. V). Jakarta: Balai Pustaka.
- Suhartono. (1994). Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945. Yogyakarta: Pustaka Pelaja.
- Sukarno. (2019). Pokok-Pokok Ajaran Marhaenisme menurut Bung Karno. Yogyakarta:Media Pressindo
- Suseno, Franz Magnis, Etika Jawa : Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 1984)
- Tirtoprojo, S. (1980). Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wardaya, Baskara T SJ, Bung Karno Menggugat : Dari Marhen, CIA, Pembantaian Massal 65 Hingga G30S (Yogyakarta : Galang Press, 2006).
- Whitney, F.L .1960. The Element of Research. Asian Ed, Overseas Book Osaka.